

Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Daerah

Irwan Safwadi¹, Saifuddin², Riki Musriandi² Usman²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, Indonesia.

²Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Abulyatama, Aceh Besar, Indonesia.

*Email korespondensi: irwan_safwadi@yahoo.com

Diterima 22 Agustus 2021; Disetujui 26 Agustus 2021; Dipublikasi 2 Oktober 2021

Abstract: This research is focused on knowing the achievement of the Main Performance Indicators (IKU) and Regional Performance Indicators (IKD) targets in the education sector in 2018, as well as analyzing the achievement of the 2019 targets listed in the 2017-2022 Nagan Raya RPJMK. By using secondary data, the data analysis process is carried out in a quantitative descriptive manner, comparing the achievements with the target indicators for the education sector listed in the RPJMK. The evaluation results found that several key performance indicators had reached the target, such as the literacy rate and qualifications of D-IV and S1 teachers, although other indicators still require serious attention going forward. Regional performance indicators that achieve the target include APS, Continuing Rates from SMP/MTs to SMA/MA, Ratio of School Availability/Population Age Primary Education, Teacher/Student Ratio of Secondary Education Teacher/Student Ratio of Primary Education, and Qualified Teachers S1/D-IV. Other indicators include the expected number of years of schooling, GER, NER, the rate of continuing from SD/MI to SMP/MTs, the Ratio of School Availability/School Age Population of Secondary Education, and the Ratio of Teachers/Students Per Class Average of Primary Schools, should be a priority agenda. Future development to support the achievement of the regional vision and mission.

Keywords: Evaluation, Key Performance Indicators, Regional Performance Indicators

Abstrak: Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) bidang pendidikan Tahun 2018, serta melakukan analisis terhadap pencapaian target Tahun 2019 yang tercantum dalam RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022. Dengan menggunakan data sekunder, proses analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif, membandingkan antara capaian dengan target indikator bidang Pendidikan yang tercantum dalam RPJMK. Hasil evaluasi menemukan beberapa indikator kinerja utama telah mencapai target, seperti angka melek huruf dan kualifikasi guru D-IV dan S1, meskipun indikator lainnya masih memerlukan perhatian yang serius ke depan. Indikator kinerja daerah yang mencapai target mencakup APS, Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar, Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar, dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV. Indikator lainnya mencakup angka harapan lama sekolah, APK, APM, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah, dan Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Dasar, patut menjadi agenda prioritas pembangunan ke depan guna menunjang pencapaian visi dan misi daerah.

Kata kunci : Evaluasi, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah

Upaya memacu dan meningkatkan daya saing daerah terus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya secara berkelanjutan. Upaya tersebut diimplimentasikan melalui prioritas pembangunan pendidikan yang merupakan bagian dari investasi Sumber daya Manusia (SDM), baik jangka menengah maupun jangka panjang. Pembangunan bidang pendidikan telah menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Nagan Raya Tahun 2017-2022.

Dalam konteks daerah, RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun (UU No.25/2004) sebagai penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye. RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional (Pasal 5, ayat 2, UU No.25/2004). Kedudukan RPJM Daerah sangat strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Mengacu pada UU No.25/2004, RPJM Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Dalam kaitan tersebut, berbagai program dan kegiatan pembangunan, termasuk bidang pendidikan yang tercantum dalam RPJM Daerah serta diimplimentasikan dalam lima tahun ke depan, diharapkan berperan strategis dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

Pembangunan bidang pendidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tujuan besar Pemerintah Kabupaten Nagan Raya 2017-2022 yang memiliki visi untuk mewujudkan Kabupaten Nagan

Raya yang sejahtera, mandiri, maju dan berdaya saing melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan syariat islam. Untuk mewujudkan visi dimaksud, di dalam Dokumen RPJMK Nagan Raya tahun 2017-2022 juga telah ditetapkan suatu misi yaitu “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan memberi dukungan maksimal terhadap pendidikan, budaya, pemuda dan olah raga”. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Umum, Agama dengan memerankan guru sebagai sentra pendidikan melalui penyusun kurikulum muatan lokal, pentingnya pendidikan agama bagi masyarakat sebagai sarana pengembangan akhlak dan normal bangsa, memacu lembaga-lembaga pendidikan keagamaan untuk lebih siap bersaing dalam hal pengembangan mutu dan kurikulum untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, peningkatan taraf kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam upaya peningkatan kualitas layanan Pendidikan disetiap jenjang pendidikan.

Untuk mewujudkan visi dan misi di atas dan untuk mengetahui tingkat pencapaiannya, serta menjadi bahan evaluasi pada tahun ke-3 pelaksanaan RPJMK Nagan Raya 2017-2022, salah satu hal yang perlu untuk dilakukan, yaitu evaluasi terhadap capaian indikator-indikator pendidikan. Dalam RPJMK Nagan Raya 2017-2022, indikator tersebut tercantum pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Lebih lanjut, IKU dan IKD bidang pendidikan dapat mencerminkan tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target-target indikator pembangunan pendidikan.

Berbagai penelitian dan studi empiris yang terkait dengan evaluasi RPJMD telah dilakukan,

seperti Yubu (2013), Christiyanto et al., (2016), Arbianto (2016), Keban (2019), dan lainnya. Yubu (2013) menemukan bahwa dalam proses implementasi RPJMD kurang lebih 30% program dan kegiatan tidak sesuai dengan waktu yang direncanakan. Demikian juga halnya dengan Christiyanto et al., (2016) yang menemukan beberapa program OPD yang diimplimentasikan tidak sesuai dengan program di RPJMD Kabupaten Kutai Barat, akibat kurangnya komunikasi atau koordinasi antara OPD dengan Bappeda. Dari sisi alokasi anggaran, Arbianto (2016) menemukan alokasi penganggaran belanja program pembangunan dalam RPJMD 2012-2016 cukup tinggi, berkisar 74% hingga 92%, namun implementasi penganggaran yang mendasarkan pada perencanaan kinerja belum terlaksana dengan baik. Adapun Keban (2019) menemukan adanya kegagalan perencanaan. Penyebabnya adalah kurangnya kapasitas pemerintah daerah, kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dalam reformasi birokrasi, dan intervensi yang kuat serta pengaruh kepentingan elit politik di daerah.

Berbagai hasil temuan empiris tersebut mengisyaratkan pentingnya evaluasi perencanaan pembangunan. Karena itu, evaluasi capaian indikator bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan guna mengetahui apakah target yang ditetapkan di dalam dokumen RPJMK sudah tercapai ataupun belum tercapai. Jika hasil evaluasi yang dilakukan terhadap suatu indikator dinyatakan belum tercapai, maka diperlukan rekomendasi yang relevan untuk memperbaiki capaian indikator dimaksud melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai tanggung jawab dan kewenangan SKPK terkait.

Selain itu, evaluasi sebagai salah satu bagian penting dari komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan pendidikan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat.

Evaluasi capaian indikator bidang pendidikan diharapkan dapat diperoleh informasi yang objektif tentang kondisi pencapaian target RPJMK Nagan Raya 2017-2022 berupa target capaian indikator bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam IKU dan IKD serta untuk selanjutnya disusun rekomendasi terkait dengan upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Memahami Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu aspek dalam siklus pengelolaan pembangunan yang hasilnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Mengacu pada prinsip *good governance*, evaluasi pembangunan harus dilakukan secara transparan, fokus, dan berhasil guna serta dilaksanakan dengan mengacu pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Wirawan (2012) menjelaskan evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk menganalisa dampak pembangunan yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan dan dinikmati oleh penerimaa

manfaat pembangunan (Bappenas, 2009). Evaluasi juga mencakup penjelasan ketercapaian atau ketidaktercapaian, disamping mengenai implikasi kebijakan yang mungkin terjadi.

Berbagai metode dan konsep evaluasi terus dikembangkan. Dari sisi evaluasi kebijakan, misalnya, Dunn (2000) menerangkan bahwa evaluasi kebijakan berkenaan dengan informasi yang diperoleh mengenai nilai atau manfaat suatu kebijakan. Dalam mengevaluasi suatu kebijakan ada beberapa indikator yang perlu digunakan, yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Evaluasi kebijakan juga dikemukakan oleh Parsons (2011) yang mengamati dari aspek yang saling terkait, yaitu a) evaluasi kebijakan dan kandungan programnya; dan b) evaluasi terhadap orang-orang yang bekerja di dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk implementasi kebijakan dan program. Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kebijakan publik. Ia merupakan unsur yang penting dalam siklus kebijakan, sama pentingnya formulasi, dan implementasi kebijakan. Oleh sebab itu kebijakan publik yang berkualitas hanya mungkin dicapai jika siklus itu mendapat perhatian seimbang, dalam hal formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Hal ini relevan dengan pendapat Dye (2002 : 45) bahwa evaluasi merupakan konsekuensi dari kebijakan publik.

Selain evaluasi kebijakan, dikenal juga evaluasi program. Evaluasi tersebut dikemukakan Tyler (1950), Cronbach (1963), dan Stufflebeam (1971). Tyler mengungkapkan evaluasi program merupakan proses untuk mengetahui apakah tujuan program sudah dapat terealisasi. Adapun Cronbach dan Stufflebeam menyatakan evaluasi program adalah

upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Terlepas dari evaluasi kebijakan dan evaluasi program, pada prinsipnya evaluasi merupakan suatu alat *assessment* atas perencanaan yang sedang berlangsung atau sudah selesai guna memastikan relevansi, efektivitas, efisiensi, dampak, dan bahkan keberlangsungannya (Bappenas, 2009). Evaluasi dilakukan secara selektif dan terus menerus. Maksud lain dari pelaksanaan evaluasi adalah penggunaan *lessons learned*, dalam suatu proses pengambilan keputusan. Secara teknis, evaluasi dapat dirancang dengan baik sehingga mampu menunjukkan hubungan kausal, misalnya antara intervensi publik dengan dampaknya, apakah positif, negatif,antisipasi, atau sama sekali di luar dugaan (Bappenas, 2009).

Jika dikaitkan dengan regulasi pemerintah, kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap rencana pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Evaluasi tersebut meliputi evaluasi terhadap: (1) kebijakan perencanaan pembangunan daerah; (2) pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan (3) hasil rencana pembangunan daerah. Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. Lebih lanjut, dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan dilakukan untuk

mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah; keselarasan antar dokumen perencanaan; dan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan mencakup pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sementara itu evaluasi terhadap hasil pembangunan mencakup capaian berbagai target indikator yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Karena itu, fokus dalam kajian ini lebih diarahkan untuk mengevaluasi capaian kinerja pembangunan pendidikan dari target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya.

Memahami Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah

Untuk mengukur dan menilai kemajuan pembangunan memerlukan suatu ukuran atau indikator kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Secara umum, indikator diartikan karakteristik yang khas atau spesifik, dapat diamati dan dapat diukur yang dapat digunakan untuk menunjukkan perubahan atau progress sebuah program yang dibuat dalam rangka pencapaian hasil. Indikator harus fokus, jelas dan khas serta tidak boleh samar dan pasti apa yang harus diukur. Perubahan yang diukur harus dapat mewakili kemajuan dari program yang direncanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2018), indikator diartikan sesuatu yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan.

Dalam pengukuran indikator, beberapa hal penting yang menjadi perhatian, mencakup 1. Apakah lokasi sesuai dengan rencana? 2. Apakah

dilaksanakan sesuai dengan waktu sebagaimana rencana? 3. Apakah besaran program sesuai dengan rencana? 4. Apakah Jumlah dana yang direncanakan telah dialokasikan dengan besaran yang sama? 5. Apakah sumber dana sesuai dengan yang direncanakan?

Setiap instansi pemerintah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai pengukuran kemajuan kinerja dan akuntabilitas. IKU diartikan sebagai suatu metrik finansial ataupun non-finansial yang digunakan untuk menentukan dan mengukur kemajuan dalam pencapaian sasaran organisasi, melalui penilaian keadaan kini dan menentukan suatu tindakan terhadap keadaan tersebut. IKU juga berhubungan erat dengan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan oleh setiap instansi dalam dokumen perencanaan. Makna tersebut tersirat secara jelas dari definisi IKU yang ditetapkan Kementerian Keuangan (2011), bahwa IKU adalah tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran organisasi. Adapun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2011) mengartikan IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Selain IKU, setiap SKPD perlu menetapkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagai penjabaran untuk pengukuran kemajuan pembangunan berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. IKD diartikan alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan IKD adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

IKD dapat memberikan informasi penting bagi masyarakat sebagai tolok ukur dalam menilai kemajuan pembangunan yang telah dilaksanakan selama periode kepala daerah.

METODE PENELITIAN

Evaluasi capaian indikator bidang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dibatasi dan difokuskan pada target indikator kinerja bidang pendidikan Tahun 2018, sebagaimana tercantum di dalam indikator pendidikan yang menjadi target pada IKU dan IKD sebagaimana tercantum di dalam Dokumen RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022. Evaluasi tersebut dilakukan dengan menggunakan data kondisi awal Tahun 2017, target dan pencapaian Tahun 2018 serta kecenderungan untuk Tahun 2019 yang merupakan target kinerja yang harus dicapai.

Evaluasi capaian kinerja indikator bidang pendidikan Kabupaten Nagan Raya memerlukan data sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022. Data-data dimaksud yaitu Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Persentase Kualifikasi Guru D IV/ SI, Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG), Angka Partisipasi Kasar, Tingkat Pendidikan yang ditamatkan, Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs, Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMM/MA, Sekolah Pendidikan SD/MI dengan kondisi baik, Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA dengan kondisi baik, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Pendidikan Dasar, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Pendidikan Menengah, Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar, Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan

Menengah, Rasio Guru/Murid rata-rata Sekolah Dasar, Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata, dan guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV.

Data-data tersebut merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan SKPK/dinas terkait, terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh dan BPS Nagan Raya. Data-data yang telah dihimpun selanjutnya dilakukan tabulasi, editing, dan pengecekan data. Selanjutnya, dilakukan analisis data secara deskriptif untuk mendapatkan kondisi capaian Indikator bidang Pendidikan Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2018, yang dibandingkan dengan target indikator pendidikan pada tahun 2018 yang tercantum dalam RPJMK Kabupaten..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Capaian Bidang Pendidikan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sesuai RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022, indikator kinerja utama (IKU) pembangunan pendidikan meliputi Angka Melek Huruf, Angka Rata-rata Lama Sekolah, Persentase Kualifikasi Guru DIV/SI, dan persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG). Untuk indikator angka melek huruf memperlihatkan capaian yang menggembirakan. Sesuai RPJMK, target angka melek huruf mencapai 94,34 persen pada tahun 2018. Akhir tahun 2018, realisasi capaian angka melek huruf sebesar 96,61 persen, atau melebihi dari yang ditargetkan. Dengan kata lain, masyarakat yang buta huruf atau tidak bisa baca dan menulis hanya sekitar 3,39 persen serta diharapkan dapat dituntaskan pada akhir periode RPJMK Kabupaten Nagan Raya.

Sementara itu, untuk indikator angka rata-rata lama sekolah memperlihatkan kinerja yang kurang memuaskan, atau tidak mencapai target. Target rata-rata lama sekolah mencapai 8,32 tahun pada tahun 2018, atau lebih tinggi dari tahun 2017 (base line) sebesar 8,24. Namun, capaian rata-rata lama sekolah

hanya sebesar 8,26 tahun, lebih rendah dari yang ditargetkan. Capaian bidang pendidikan untuk indikator kinerja utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Capaian Bidang Pendidikan IKU

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Status Capaian	Proyeksi
			2017	2018	2018		2019
1	Angka Melek Huruf	%	93,41	94,34	96,61	Tercapai	95,29
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,24	8,32	8,26	Tidak tercapai	8,41
3	Persentase Kualifikasi Guru D IV/ S1	%	37,51	45,01	83,92	Tercapai	54,01
4	Persentase Guru yang Lulus Uji Kompetensi Guru (UKG)	%	53,16	58,48	-	-	64,32

Sumber : RPJMK Nagan Raya 2017-2022, Dinas Pendidikan

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menjadi acuan penting dalam menilai kelayakan guru dalam mengajar. Guru layak mengajar berkualifikasi sarjana atau Diploma IV. Realisasi persentase kualifikasi guru D-IV dan S1 pada tahun 2018 meningkat sangat drastis dari yang ditargetkan serta jauh lebih tinggi dari tahun 2017. Realisasi capaian persentase kualifikasi guru D-IV dan S1 mencapai 83,92 persen tahun 2018, dari target sebanyak 45,01 persen.

Data Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya (2019) mengungkapkan bahwa guru berkualifikasi D-IV dan S1 (layak mengajar) di SD mencapai 1.291 orang dan SMP sebanyak 704 orang. Bahkan, untuk SMP semua guru telah layak mengajar. Adapun yang tidak layak mengajar hanya sebanyak 382 orang di SD serta diharapkan dapat dituntaskan hingga akhir periode RPJMK Nagan Raya.

Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Sesuai RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022, indikator kinerja daerah (IKD) terbagi berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat dan aspek pelayanan umum yang termasuk dalam layanan urusan Wajib Dasar. Berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, beberapa indikator yang termasuk dalam IKD dalam RPJMK Kabupaten Nagan Raya adalah angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, dan angka harapan lama sekolah. Ketiga indikator tersebut merupakan pembentuk dalam Indeks Pembangunan Manusia. Jika capaian indikator tersebut cenderung meningkat signifikan dapat mendorong peningkatan pembangunan manusia Kabupaten Nagan Raya yang berkelanjutan.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia

(masyarakat/penduduk). IPM juga menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM pertama sekali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalankan pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya

beli.

Dari ketiga indikator tersebut, hanya angka melek huruf yang memperlihatkan realisasi capaian yang meningkat dibandingkan dengan target RPJMK Nagan Raya. Adapun indikator angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah memperlihatkan realisasi yang tidak mencapai target, meskipun memperlihatkan peningkatan dibandingkan tahun 2017. Realisasi indikator angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,26 tahun dan angka harapan lama sekolah sebesar 14,11 tahun pada tahun 2018. Adapun target angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,32 tahun dan angka harapan lama sekolah sebesar 14,23 tahun pada tahun 2018 sesuai RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022.

Angka harapan lama sekolah sebesar 14,23 diartikan bahwa bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,23 tahun, meningkat 0,14 tahun dibandingkan tahun 2017. Lebih lanjut, angka rata-rata lama sekolah sebesar 8,32 tahun diartikan bahwa penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Nagan Raya secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,32 tahun, relatif meningkat 0,11 tahun dibandingkan tahun 2017.

Tabel 2 Capaian Bidang Pendidikan IKD Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

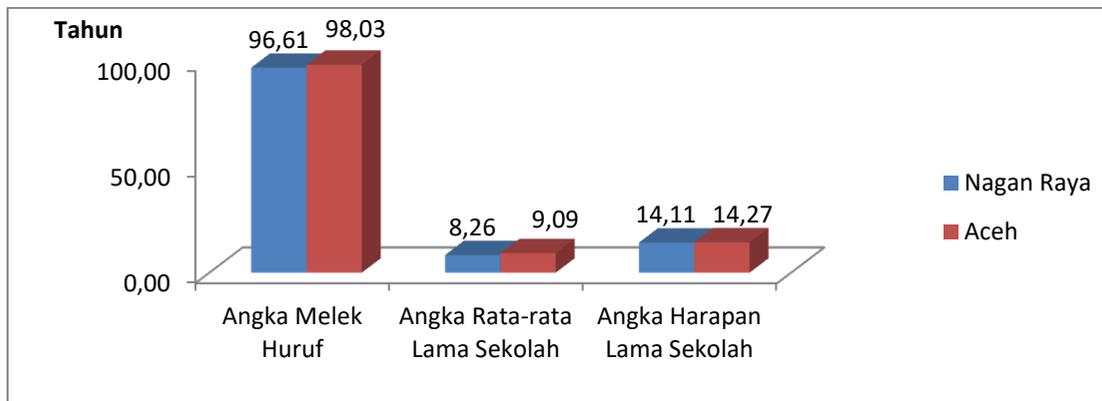
No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target 2018	Relialisasi 2018	Status Capaian	Proyeksi
							2019
1	Angka Melek Huruf	%	93,41	94,34	96,61	Tercapai	95,29
2	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,24	8,32	8,26	Tidak tercapai	8,41
3	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,09	14,23	14,11	Tidak tercapai	14,37

Sumber : RPJMK Nagan Raya 2017-2022, Dinas Pendidikan

Perbandingan capaian angka melek huruf, angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata

lama sekolah dengan provinsi Aceh dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 1 Capaian angka melek huruf, angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Aceh dan Nagan Raya



Sumber : RPJMK Nagan Raya 2017-2022, Dinas Pendidikan

Beberapa indikator yang tercantum dalam RPJMK Nagan Raya terutama untuk layanan urusan wajib dasar dapat diuraikan sebagai berikut :

Angka Partisipasi Kasar

APK merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. APK adalah rasio jumlah peserta didik, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin

banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Capaian APK pada semua jenjang pendidikan pada tahun 2018 terlihat bervariasi dan tidak mencapai target yang diharapkan. Capaian APK pada tingkat pendidikan SD/MI sebesar 91,81 persen, dari target diatas 100 persen (109,03 persen). Angka tersebut juga lebih rendah dari tahun 2017 yang sebesar 109,47 persen.

Untuk APK jenjang pendidikan SMP, capaian pada tahun 2018 sebesar 78,37 persen, lebih rendah dari SD. Capaian tersebut lebih rendah target sebesar 106,46 persen dan jauh lebih rendah dari capaian tahun 2017 (106,90 persen). Adapun APK tingkat pendidikan juga terlihat tidak mencapai target yang diharapkan serta capaiannya cenderung lebih rendah dari tahun 2017. Capaian APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2018 sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Tabel 3 Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK)

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Status Capaian	Proyeksi
							2019
1	APK SD/MI/Paket A	%	109,47	109,03	91,81	Tidak Tercapai	108,28
2	APK SMP/MTs/Paket B	%	106,90	106,46	78,37	Tidak Tercapai	106,31
3	APK SMA/MA/SMK	%	86,02	86,57	73,75	Tidak Tercapai	87,35

Sumber : RPJMK Nagan Raya 2017-2022, Dinas Pendidikan

Tingkat Pendidikan yang ditamatkan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Proporsi penduduk berdasarkan pendidikan yang ditamatkan didominasi tamat SD dan SMP pada tahun 2018. Sementara itu, penduduk yang menamatkan pendidikan tinggi masih relatif terbatas di Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam RPJMK, indikator tingkat pendidikan yang

Tabel 4 Capaian Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target 2018	Relialisasi 2018	Status Capaian	Proyeksi
							2019
1	Tamat SD Sederajat	%	26,70	27,22	26,19	Tidak Tercapai	28,43
2	Tamat SMP Sederajat	%	16,87	17,38	18,67	Tercapai	19,19
3	Diploma I/II/III	%	3,33	3,43	3,57	Tercapai	3,63
4	Diploma IV/S1	%	3,72	4,22	4,77	Tercapai	5,42
5	S2/S3	%	0,59	0,74	0,07	Tidak Tercapai	0,89

Sumber : RPJMK Nagan Raya 2017-2022, Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Capaian APM pada semua jenjang pendidikan dasar pada tahun 2018 juga terlihat bervariasi. Capaian APM pendidikan SD/MI jauh lebih baik daripada pendidikan SMP/MTs. Namun demikian, capaian APM pada

ditamatkan hanya terealisasi yang menggehirkan pada tingkat pendidikan Diploma I/II/II dan Diploma IV/S1, disamping juga tingkat pendidikan SMP. Dari target sebesar 3,43 persen tamat Diploma I/II/II, terealisasi sebesar 3,57 persen tahun 2018. Demikian juga untuk tamat sarjana (Diploma IV/S1) terealisasi sebesar 4,77 persen, dari target 4,22 persen tahun 2018. Adapun penduduk yang tamatan dari S2/S3 tidak lebih dari 0,07 persen tahun 2018, lebih rendah dari target sebesar 0,74 persen, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut.

tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tidak mencapai target yang tercantum dalam RPJMK Nagan Raya. Sampai tahun 2018, capaian APM SD/MI mencapai 81,88 persen, sementara APM SMP/MTs sebesar 53,67 persen. Capaian APM pada tingkat pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Capaian Angka Partisipasi Murni (APM)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target 2018	Relialisasi 2018	Status Capaian	Proyeksi
							2019
1	APM SD/MI/Paket A	%	98,73	98,78	81,88	Tidak Tercapai	98,83
2	APM SMP/MTs/Paket B	%	88,83	88,88	53,67	Tidak Tercapai	88,92

Sumber : RPJMK Nagan Raya 2017-2022, Dinas Pendidikan

Evaluasi Capaian Pembangunan Daerah...

(Safwadi, Saifuddin, Musriandi & Usman, 2021)

Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) diartikan sebagai persentase jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dibagi dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang masih bersekolah di semua jenjang pendidikan. APS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK dan 19-24 tahun mewakili umur setingkat perguruan tinggi. Semakin tinggi APS berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah. Dengan kata lain, meningkatnya APS dimaknai adanya keberhasilan di bidang pendidikan, terutama dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan bagi seluruh penduduk.

APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia

pendidikan dasar. Penurunan dan kenaikan nilai APS sangat dipengaruhi oleh banyaknya jumlah murid usia sekolah. Namun naiknya persentase jumlah murid tidak dapat langsung diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan penambahan sarana sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Kondisi APS pada kelompok umur setingkat SD terlihat menggembirakan dibandingkan dengan APS pada kelompok umur setingkat SMP. Sampai tahun 2018, APS SD mencapai 100 persen dan APS SMP sebesar 97,77 persen. Angka APS SD meningkat dibanding tahun 2017 yang sebesar 99,36 persen serta mencapai target yang diharapkan pada tahun 2018. Upaya perluasan layanan pendidikan SMP sangat diperlukan agar semua penduduk usia sekolah setingkat SMP dapat menggap pendidikan yang lebih baik.

Tabel 6 Capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Relialisasi	Status Capaian	Proyeksi
			2017	2018	2018		2019
1	APS SD/MI/Paket A	%	99,36	99,37	100,00	Tercapai	99,40
2	APS SMP/MTs/Paket B	%	99,11	99,12	97,77	Tercapai	99,14

Sumber : RPJMK Nagan Raya 2017-2022, Dinas Pendidikan

Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan (AM) sekolah merupakan persentase jumlah lulusan yang melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sesuai RPJMK Kabupaten Nagan Raya, ditargetkan AM dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar 100 persen pada

tahun 2018. Target tersebut mencerminkan bahwa semua lulusan SD/MI dapat tertampung untuk menggap pendidikan pada SMP/MTs, yang tahun sebelumnya (tahun 2017) sudah mencapai 100 persen. Untuk AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA mencapai 91,15 persen tahun 2017

dan ditargetkan pada tahun 2018 mencapai 91,33 persen.

Data Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya menunjukkan bahwa AM dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA terealisasi mencapai 607,14 persen (kondisi tahun 2018). Angka tersebut sangat tinggi dibandingkan tahun 2017 dan target tahun 2018. Peningkatan yang sangat tinggi ini dipicu dari karena adanya lulusan SD dari daerah lain, terutama daerah perbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya yang melanjutkan ke SMP/MTs di wilayah Kabupaten

Nagan Raya. Lulusan peserta didik dari daerah lain yang mengecap pendidikan di Nagan Raya dipandang sangat menggembirakan yang mencerminkan bahwa sekolah di Nagan Raya memiliki pendidikan yang berkualitas.

Sementara itu, AM dari SD/MI ke SMP/MTs hanya terealisasi sebesar 77,10 persen tahun 2018. Capaian tersebut lebih rendah dari tahun 2017 serta tidak mencapai target yang tercantum dalam RPJMK Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 7 Capaian Angka Melanjutkan Sekolah

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target	Realisasi	Status Capaian	Proyeksi
			2017	2018	2018		2019
1	AM dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100,00	100,00	77,10	Tidak tercapai	100
2	AM dari SMP/MTs Ke SMA/SMK/MA	%	91,15	91,33	607,14	Tercapai	91,79

Sumber : RPJMK Nagan Raya 2017-2022, Dinas Pendidikan

Indikator Pendidikan Lainnya

Indikator pendidikan lainnya adalah SD/MI dengan kondisi baik, Pendidikan SMP/MTs dan SMA/MA dengan kondisi baik, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Pendidikan Dasar, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Pendidikan Menengah, Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar, Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah, Rasio Guru/Murid rata-rata Sekolah Dasar, Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata, dan guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV. Target untuk masing-masing indikator tersebut bervariasi pada tahun 2018.

Data Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya memperlihatkan capaian yang bervariasi dari masing-masing indikator. Rasio ketersediaan sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio

ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk Nagan Raya. Untuk indikator rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan dasar, menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari target sebesar 69,96 sekolah dasar per 10.000 penduduk tahun 2018, dicapai sebesar 70,19 sekolah per 10.000 penduduk, atau lebih tinggi dari tahun 2017.

Sebaliknya indikator rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan menengah memperlihatkan capaian yang kurang menggembirakan. Capaian rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia pendidikan menengah hanya sebesar 29,71 sekolah per 10.000 penduduk lebih rendah dari target (33,78 sekolah per 10.000 penduduk) atau lebih rendah dari capaian tahun 2017 (33,71 sekolah per 10.000 penduduk).

Pelayanan pendidikan dapat diamati dari rasio

guru terhadap murid. Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan bahwa ketersediaan tenaga pendidik di setiap sekolah dengan layanan belajar untuk murid. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Untuk rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar mengalami peningkatan yang drastis pada tahun 2018. Hal ini mengindikasikan guru semakin banyak menanggung jumlah murid dalam memberikan pembelajaran. Demikian juga untuk rasio guru/murid sekolah pendidikan menengah yang memperlihatkan juga peningkatan dibandingkan tahun 2017.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata

Tabel 8 Capaian Indikator Pendidikan Lainnya

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2017	Target 2018	Realisasi 2018	Status Capaian	Proyeksi
							2019
1	SD/MI Kondisi Bangunan Baik	%	85,70	94,27	-	-	94,74
2	SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan Baik	%	87,60	88,91	-	-	90,25
3	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	Rasio Indeks	69,82	69,96	70,19	Tercapai	70,31
4	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah	Rasio Indeks	33,71	33,78	29,71	Tidak tercapai	33,94
5	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	Rasio Indeks	75,66	74,82	939,64	Tercapai	73,19
6	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah	Rasio Indeks	81,63	80,79	987,75	Tercapai	79,19
7	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Dasar	Rasio Indeks	71,18	70,32	0,06	Tidak tercapai	68,67
8	Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Menengah	Rasio Indeks	69,96	68,10	-	-	67,45
9	Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	%	37,51	45,01	83,92	Tercapai	54,01

Sumber : RPJMK Nagan Raya 2017-2022, Dinas Pendidikan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan capaian indikator bidang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya disimpulkan beberapa hal utama yang menjadi

adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Untuk pendidikan menengah adalah rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan menengah per kelas per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan juga ketersediaan tenaga pengajar guru pendidikan menengah per kelas. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

perhatian. Untuk indikator kinerja utama, realisasi capaian angka melek huruf sebesar 96,61 persen, dari target angka melek huruf mencapai 94,34 persen pada tahun 2018, atau tercapai target. Namun, masyarakat yang buta huruf atau tidak bisa baca dan

menulis sekitar 3,39 persen, diharapkan dapat dituntaskan pada akhir periode RPJMK Kabupaten Nagan Raya. Indikator angka rata-rata lama sekolah memperlihatkan kinerja yang kurang memuaskan, atau tidak mencapai target, dengan realisasi sebesar 8,26 tahun, dari target rata-rata lama sekolah mencapai 8,32 tahun pada tahun 2018. Sementara itu, realisasi persentase kualifikasi guru D-IV dan S1 pada tahun 2018 meningkat sangat drastis, yaitu sebesar 83,92 persen tahun 2018, dari target sebanyak 45,01 persen. Untuk indikator kinerja daerah (IKD), yang tidak mencapai target pada tahun 2018, meliputi angka harapan lama sekolah, APK, APM, angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah, dan Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata Sekolah Dasar. Adapun indikator kinerja daerah (IKD), yang mencapai target pada tahun 2018, meliputi APS, Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA, Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar, Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Menengah Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar, dan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV.

Saran

Memperhatikan hasil temuan capaian indikator bidang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya, terutama indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD), direkomendasikan beberapa hal utama, yaitu

Beberapa indikator yang telah memperlihatkan capaian realisasi yang menggembirakan dapat dipertahankan dan terus diupayakan program dan kegiatan pembangunan pendidikan untuk mencapai target tahun berikutnya hingga akhir periode

RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022;

Untuk indikator yang telah mencapai target tahun 2018, serta target yang ditetapkan 2019 lebih rendah dari 2018, dapat dilakukan penyesuaian (revisi) target untuk tahun-tahun berikutnya.

Untuk capaian indikator yang belum mencapai target tahun 2018, dapat diupayakan langkah meliputi memastikan anak usia sekolah tetap bersekolah pada usia pendidikan SD dan SMP (melalui menggugah kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak, bantuan biaya dan alat peralatan sekolah), penambahan guru sesuai kebutuhan dan kompetensi/keahlian serta berijazah S1, melanjutkan pendidikan bagi tenaga peserta didik, dan program pendidikan lainnya.

Beberapa indikator pendidikan yang lainnya sesuai SPM pendidikan dan Permendagri No.86 Tahun 2017 yang belum tercantum dalam RPJMK Nagan Raya, dapat dipertimbangkan untuk dinilai kinerjanya dan dimasukkan dalam RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022..

DAFTAR PUSTAKA

- Arbianto, Muhammad Purwo. (2016). Evaluasi Keterkaitan Perencanaan Kinerja dan Penganggaran (Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta). *Tesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Bappenas. 2004. Pedoman Penyusunan Indikator, Pemantauan dan Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja. Jakarta : Bappenas
- Bappenas. 2009. Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektor. Jakarta : Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Kabupaten Nagan Raya Dalam Angka 2019. Suka Makmue, Nagan Raya.

- Cronbach, L.J. 1963. Course improvement through evaluation. *Teachers College Record*, 64, 672–683.
- Christiyanto, Franz., Nurfitriyah, Hj., & Sutadji, H. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelancaran Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011 – 2015. *eJournal Administrative Reform*, 4(2), pp.291-300.
- Dunn, William N, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan), edisi kedua, Jogyakarta, Gajahmada University Pres.
- Dye, Thomas R. 2002. Understanding Public Policy. New Jersey : Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- KBBI. 2018. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional.
- Kementerian Keuangan RI. 2011. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/Kmk.01/2011 Tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Keban, Yemias T. (2019). The Complexities of Regional Development Planning Reform: The Indonesian Case. *Policy & Governance Review*, 3(1), pp.12-25.
- Yubu, Demianus. (2013). Evaluasi Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Barat 2006-2010 Melalui Persepsi Masyarakat. *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Parsons, Wayne, 2011. Public Policy : Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan, Jakarta, Kencana
- Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (2018). Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Nagan Raya Tahun 2017-2022.
- Stufflebeam, D. L. (1971). The use of experimental design in educational evaluation. *Journal of Educational Measurement*, 8(4), 267–274. doi:10.1111/jedm.1971.8.issue-4.
- Tyler, R. 1950. Models of Teaching. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs.
- Wirawan. (2012). *Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta : Rawjawali Prses